

LAUNCHING PROGRAM PESIAR

Jombang, 30 Agustus 2023



PELUNCURAN PROGRAM PESIAR BPJS KESEHATAN DI JOMBANG

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (tengah), bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (kedua kanan), Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) Taufik Madjid (kedua kiri), Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDDT Sugito (kiri) dan Bupati Jombang Mundjidah Wahab (kanan) menghadiri peluncuran program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi) di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Rabu (30/8).

Jika Airin-Arief Duet di Pilkada, Pengamat: Mereka Sulit Ditandingi

Keduanya sangat piawai dalam menempatkan diri di kepengurusan partai. Seperti Airin, ia menjadi kader generasi muda yang mampu mendobrak senioritas di kepengurusan Golkar dengan menjadi Bendahara DPP Partai Golkar. Airin juga mampu diingat masyarakat Tangsel sebagai pemimpin yang cukup disukai. Sementara Arief, mampu membuat partai politik di Kota Tangerang tidak berani memunculkan jagoannya melawan Arief. Sehingga saat Pilkada Kota Tangerang, Arief melawan kotak kosong.

TANGSEL (IM)- Pengamat politik, Tamil Selvan

berpendapat, Airin Rachmi Diany akan tidak tertandingi di Pilgub Banten 2024 jika bisa berduet dengan Arief R. Wismansyah sebagai wakilnya.

Menurutnya, Airin dan Arief adalah sosok pemimpin yang sangat ideal jika mereka bisa bersatu mencalonkan diri di Pilgub Banten 2024.

Tamil mengatakan, baik Airin maupun Arief adalah dua tokoh yang berprestasi karena mampu memimpin daerahnya masing-masing.

Keduanya sangat piawai dalam menempatkan diri di kepengurusan partai. Seperti Airin, ia menjadi kader generasi muda yang mampu mendobrak senioritas di kepengurusan Golkar dengan menjadi Bendahara DPP Par-

tai Golkar.

Airin juga mampu diingat masyarakat Tangsel sebagai pemimpin yang cukup disukai.

Sementara Arief, menurut Tamil, mampu membuat partai politik di Kota Tangerang tidak berani memunculkan jagoannya melawan Arief. Sehingga saat Pilkada Kota Tangerang, Arief melawan kotak kosong.

Menurut Tamil, semua parpol mendukung Arief melawan kotak kosong adalah bukti elektoral Arief tinggi, sehingga parpol tidak berani mengusung kadernya melawan Arief. Maka, sambungnya harus diakui kepemimpinan Arief di Kota Tangerang cukup berhasil.

“Dua kepemimpinan ini

ketika kita jadikan satu, saya kira tidak ada lawan lain lagi yang bisa menandingi mereka,” ujar Tamil, Rabu (30/8).

Meski begitu, Tamil mengakui bahwa jika berbicara realitas politik, maka kekuatan politik lain tidak akan membiarkan dua kekuatan tersebut bersatu.

“Tentu akan ada upaya politik untuk menghasut agar Arief tidak menjadi wakil Airin, karena dikatakan wakil itu hanya ban serep, tidak ada kewenangan, sementara kalau maju tempur kemungkinan Arief akan menang, ya kita lihat saja realitas politik yang ada,” jelasnya.

Tamil menegaskan kembali jika Airin dan Arief dapat disandingkan, maka akan menjadi kekuatan politik yang tidak akan terkalahkan. ● pra

BPJS Kesehatan Luncurkan Program PESIAR

CILEGON (IM)- BPJS Kesehatan resmi meluncurkan Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta

dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan, Program PESIAR ini dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah setempat, guna mencapai target minimal 98 persen penduduk sebagai peserta JKN sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.

Ghufron menyebut, capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui Program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, dimana satu SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas, salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100 persen cakupan penduduk desa sebagai peserta JKN.

“Program PESIAR tersebut juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang menginstruksikan kepada 30 Kementerian/Lembaga termasuk Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing,” jelas Ghufron.

Selaras dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT), dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga di tingkat Desa dan Kelurahan melalui kegiatan PESIAR.

Selain itu, Kementerian Desa dan PDPT juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

8 Tahun 2022, yang menginstruksikan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi terkait Program JKN di masyarakat Desa.

“Nantinya, proses pemetaan ini akan dibantu oleh Agen PESIAR yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di Desa tertentu, penyesiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat Desa. Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” tambah Ghufron.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah menjalankan pilot project di 126 Desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Meski terdapat tantangan, namun Ghufron optimistis dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, Program PESIAR mampu mendorong percepatan capaian UHC demi memberikan perlindungan kesehatan seluruh penduduk di tingkat Desa.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa dan PDPT, penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan-Kemendes PDPT, dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Jombang.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menjelaskan, anggaran negara telah mengalami peningkatan 20 persen dan diperuntukkan untuk masalah kesehatan.

Menurutnya, hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Program JKN. Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan muncul pada SDGs Desa. Artinya, BPJS Kesehatan harus dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi warga Desa yang masih miskin. ● pra

Terancam Gagal Panen Akibat Kekeringan, Sawah di Sidoarjo Diasuransikan

SIDOARJO (IM)- Sawah seluas lima hektare milik petani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo yang mengalami kekeringan dan terancam gagal panen akan diasuransikan.

Petani di desa itu sebelumnya mengeluhkan lahan pertanian mereka yang terancam gagal panen. Hal tersebut dikarenakan kekeringan dan mereka kesulitan mendapatkan air. “Tentu jika gagal panen pasti mereka merugi, oleh karena itu saya bersama BHS Peduli akan mendatangi bank BRI atau BNI untuk mengasuransikan lahan pertanian milik petani sebagai antisipasi kerugian petani jika terjadi gagal panen,” kata politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), Rabu (30/8). Bambang yang pernah menjadi calon bupati Sidoarjo tersebut akan menanggung atau membayar biaya asuransi petani. Untuk satu hektare lahan pertanian asuransinya untuk petani sekitar Rp6 juta. Selain mengasuransikan lahan pertanian, Bambang juga memastikan lahan pertanian di Desa Sentul teraliri air.

Bambang menambahkan, kebutuhan air dari semua lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo dapat terpenuhi bila ada manajemen air yang bagus, yaitu memanfaatkan sumber dari Dam Rolag Songo Kecamatan Tarik, Sidoarjo. “Saya melihat sendiri, Dam Rolag Songo di Tarik debit airnya sangat cukup untuk mengairi seluruh lahan pertanian di Sidoarjo. Bahkan 10 atau 50 kali

lipat sangat bisa jika melihat debit airnya seperti itu. Saya berani jamin mari kita hitung debitnya berapa meter kubik. Ini lah nanti yang akan kita dorong melalui BBWS dengan bantuan pemerintah tentunya,” ujar Bambang.

Sementara itu Kepala Desa Sentul, Ahmad Yani mengaku, area persawahan di desanya kerap alami kekeringan setiap tahunnya. Hal tersebut diakibatkan aliran air yang bersumber dari sungai kanal Porong sangat minim dengan debit air rendah.

Selain itu adanya pompa-pompa Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk mengisi kolam penampungan air dari lumpur Lapindo juga menjadi penghambat distribusi air di area persawahan Desa Sentul.

“Kalau debit air dari Kanal Porong atau Rolag Songo bisa terjaga, airnya sampai sini, Insya Allah para petani bisa rutin panen satu tahun dua hingga tiga kali. Nah ini kan nanti kan dipasang pompa dari Pak Bambang, kapasitas tiga dim dan semoga sawah di sini kembali teraliri air,” kata Ahmad Yani. ● pra



SEKOLAH GRATIS BERBASIS ASRAMA SMK N JAWA TENGAH

Siswa jurusan teknik mesin merawat inovasi mesin penambal jalan berlubang di SMK N Jawa Tengah Kampus Semarang, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8). Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, sejak 2014 lalu, sekolah berbasis konsep asrama tersebut telah meluluskan 1.837 siswa (825 orang lulusan SMK N Jateng Kampus Semarang, 336 orang lulusan SMK N Jateng Kampus Pati, dan 676 orang lulusan SMK N Jateng Kampus Purbalingga) yang 80 persen di antaranya terserap di dunia kerja maupun perguruan tinggi, baik di tingkat nasional dan luar negeri.

Tidak Ada Pemecatan Massal untuk Honorer!

SERANG (IM)- Ketua Komisi I DPRD Banten, Ahmad Jazuli menegaskan tidak ada pemecatan massal terhadap para tenaga honorer.

Hal itu disampaikan Jazuli dihadapan para tenaga honorer dari Forum Tenaga Honorer DPUPR Banten yang menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Banten di ruang rapat komisi, Kota Serang, kemarin.

Jazuli mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan surat edaran (SE) terbaru. SE Menteri PANRB ini berisi tentang pengalokasian anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).

Dalam SE MenPAN-RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks. THK-2 dan Non ASN. SE ini ditandatangani oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas tertanggal 25 Juli 2023. Menurut SE tersebut, sesuai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kementerian PAN-RB meminta instansi pusat dan daerah

untuk menjalankan sejumlah langkah, salah satunya menghitung PPPK dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non ASN dalam basis data BKN.

“Tidak akan ada penghapusan gitu, tidak akan ada PHK masalah karena ini sudah berdampak luas karena di seluruh Indonesia terdapat 2,3 juta tenaga honorer, dan di Banten sendiri ada 16.000 tenaga honorer,” kata Jazuli.

Dia meminta para tenaga honorer untuk tidak galau dengan SE MenPAN RB sebelumnya yang menyebut akan menghapus tenaga honorer pada 23 November 2023 ini.

Sebab, pada SE MenPAN RB yang terbaru, Pemerintah Pusat telah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk tetap melakukan penganggaran terhadap gaji para tenaga honorer.

“Nah kita juga ingin memberikan kepastian kepada teman-teman yang lagi galau bahwa tanggal 28 November 2023 kan ada ada penghapusan, ini kita berikan bahwa tidak akan ada penghapusan, sekali lagi tidak akan ada PHK masal,” ujarnya. ● pra

Asap Kebakaran TPA Sarimukti Batasi Pandangan Pengguna Jalan

BANDUNG BARAT (IM)- Asap kebakaran TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, membuat pandangan pengguna jalan sangat terbatas, Kamis (30/8). Memasuki hari kedua belas dampak bencana kebakaran TPA Sarimukti, polusi asap terlihat masih cukup tebal menyelimuti Desa Sarimukti.

Dari pantauan di lokasi, kondisi tersebut terjadi di ruas jalan Cipatat Rajamandala menuju arah Cipeunduy sejauh 5 kilometer (km), kondisi asap tebal membuat pandangan pengguna jalan sangat terbatas dan harus ekstra hati-hati saat melintas.

“Seperti ini saja banyak asap sekali, dan yang namanya polusi ya bahaya,” tutur Supriyadi.

Tak hanya itu, asap sisa kebakaran TPA Sarimukti yang tertumpukan juga masih hingga saat ini masih menyelimuti rumah rumah warga. Padahal radius rumah warga cukup jauh sekitar tiga kilometer hingga lima kilometer.

Warga korban paparan asap yang mendatangi posko kesehatan gabungan pun terus bertambah dengan mayoritas mengeluhkan sakit pernapasan kemudian batuk hingga iritasi mata. “Sekal napas ya, soalnya aku punya alergi menahun udah punya asma dari lama apalagi kalau ada asap-asap ini,” ujar Lilis Hindun, Warga Sarimukti.

Lilis yang memiliki riwayat penyakit asma mengatakan penyakitnya biasa kambuh hanya satu kali dalam seminggu. Namun semenjak adanya asap kebakaran TPA Sarimukti, dalam sebulan penyakitnya bisa kambuh tiga kali. “Kita sekeluarga punya alergi semuanya, alergi debu, asap dan adanya peristiwa ini sangat berdampak sekali bagi saya dan keluarga,” punjakasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mencatat sejak hari pertama posko kesehatan dibuka selama sepekan lebih dari 400 warga terpapar polusi asap kebakaran TPA Sarimukti. ● pra



KERAJINAN WADAH AIR MINUM BERBAHAN BAMBU

Perajin menyelesaikan pembuatan wadah air minum (tumbler) berbahan bambu di workshop Project Bamboo, desa Pendem, Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (30/8). Kerajinan tersebut dijual dengan harga Rp15 ribu hingga Rp125 ribu dan telah dipasarkan ke sejumlah kota diantaranya Solo, Jakarta, Bandung, hingga Bali dengan memanfaatkan media daring.

Cegah LGBT, DPRD Jabar Minta Masyarakat Bentengi Keluarga dengan Agama

BANDUNG (IM)- Kampanye LGBT, semakin masif. Tak hanya ditampilkan lewat film kartun, kampanye LGBT pun mulai menyusupi ke perguruan tinggi.

Melihat kondisi ini, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah meminta, semua keluarga untuk membentengi keluarganya masing-masing. Tentu saja, membentenginya dengan agama.

“Keluarga di Indonesia khususnya Jabar, harus membentengi keluarga masing-masing. Pertama kembalikan pada agama,” ujar Siti, Rabu (30/8).

Siti mengatakan, keluarga Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Yaitu, hidup berdasarkan agama masing-masing.

“Kalau 80 persen warga Indonesia khususnya di Jabar muslim, tentu dasar-dasar Al Quran harus jadi pondasi semua warga Jabar,” katanya.

Untuk menangkal LGBT, kata Siti, kuncinya adalah agama. Hal ini, sesuai dengan Pancasila sila pertama. Karena, dulu negeri ini pun hadir karena peran tokoh agama dan para pahlawan yang bertaqwa berasal dari ulama. Serta, membuat dasar-dasar negara.

“Negeri ini hadir Hasil musyawarah ulama dan nilai-nilai Pancasila. Jadi, harus pen-

guatan kembali nilai-nilai agama ini sangat penting,” katanya.

Siti mengatakan, pihaknya tentu menyambut baik Perda anti LGBT. Karena, Perda itu dibuat tentu sesuai dengan apa yg dirasakan dilapangan terutama kasus-kasus HIV yang semakin tinggi. Kondisi ini, membuat keprihatinan dan mendorong kebijakan bagi Pamda untuk membuat perda.

“Apalagi kan kemarin viral, Kampanye ini sudah masuk ke perguruan tinggi ITB saja bisa kecolongan,” katanya.

Siti menilai, LGBT ini sebenarnya bukan isu baru tapi lama, namun mereka melihat peluang atas nama HAM. “Saya seorang ibu juga yang khawatirkan kan simbol-simbol dan ini sudah lama sekali mulai dari tumpeng warna warni, baju, kue, sejak lima tahun lalu digaungkan,” katanya.

Bahkan, kata dia, simbol tersebut menjadi dipermalakumkan. Masyarakat tanpa terasa ada dipikiran kaum tersebut. Tentu saja, sebuah masyarakat bertangung jawab untuk menghidupkan kembali Pancasila, terutama Ketuhanan yang Maha Esa. “Saya berharap Ketuhanan yang Maha Esa ini jangan dibenturkan dengan HAM. Sila pertama ini harus dipahami betul agar jadi ruh nilai-nilai dasar,” katanya. ● pra